

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Kasus Taman UMKM Bungkarno)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama

Oleh :
TOHIR BAHNAN
NPM. 1731040055



**Program Studi Pemikiran Politik Islam
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Kasus Taman UMKM Bungkarno)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama**

**Oleh :
TOHIR BAHNAN
NPM. 1731040055**

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

**Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M. Si
Pembimbing II : Abdul Qohar, M. Si**



FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022 M

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan merupakan upaya untuk mewujudkan satu kesatuan dalam berpikir dan menghindari kerancuan makna kata, maka perlu ditegaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul Skripsi “**Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Taman UMKM Bungkarno)**”. Guna menghindari interpretasi yang berbeda dari pada pembaca mengenai judul Skripsi skripsi, maka beberapa istilah yang ada pada judul tersebut perlu dijabarkan. Penegasan judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.¹ Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.² Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya.³

2. Kebijakan

Secara umum kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Noeng Muhadjir mengemukakan bahwa kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) meningkatkan taraf hidup untuk semua; (2) memastikan keadilan sosial, keadilan undang-undang, dan peluang untuk pertumbuhan pribadi; (3) menyediakan peluang yang bermakna untuk penyertaan masyarakat dalam penyelesaian masalah, membuat keputusan, dan pelaksanaan; dan (4)terjaminnya pengembangan berkelanjutan.⁴

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 3 Tahun 2016

Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, yang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki peranan penting untuk peningkatan ekonomi masyarakat adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM merupakan komponen usaha terbesar nasional yang menggerakkan lebih banyak pelaku ekonomi, dibandingkan dengan usaha dengan modal besar yang hanya dikuasai oleh segelintir pelaku usaha. UMKM dengan modal yang relatif lebih kecil menjadi alternatif masyarakat untuk mengembangkan usaha mandiri. Suatu geliat ekonomi masyarakat yang harus didukung untuk menggerakkan lebih banyak pelaku usaha kecil ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

4. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga UMKM mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

5. Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM diperoleh pengertian bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 352.

² Mulyadi, Deddy. Studi kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta,2015), h. 12.

³ Budiona, Kamus Ilmiah Populer Internasional (Surabaya: Alumni, 2005), hal. 240.

⁴ Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan Berdasarkan PERDA No 3 Th 2016, Usaha Mikro merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro dan atau memenuhi kriteria yang hasil penjualan tahunan atau kepemilikan. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-

6. Studi Kota Bandar Lampung

Studi adalah kajian, telaah, penelitian, dan penyelidikan ilmiah.⁵ Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibukota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau Jawa.⁶ Jadi yang dimaksud dengan studi di Kota Bandar Lampung adalah suatu penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Enggal, Provinsi Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan pengangguran merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masalah yang ada di Indonesia. Sumber daya manusia yang masih minim sehingga sulit mendapatkan sumber penghasilan serta kebutuhan ekonomi yang mendesak menjadikan perekonomian masyarakat menjadi sangat lemah. Ini merupakan hal yang selalu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dari massa ke massa. Setiap tahun anggaran selalu digelontorkan oleh pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusianya yang harus ditingkatkan dari segi pengetahuan serta keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal dan pelaksanaan program pembangunan dapat terealisasi.

Allah SWT Berfirman :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia...” (QS. Al-Ahzab:72)

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya dengan tujuan dibentuknya Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan

⁵ Peter Salim, Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia..... .h. 861

⁶Pengertian Kota Bandar Lampung ”(Online), tersedia di:https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung (16 November 2021).

ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seutuhnya.

Di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi yang menimpa hingga kini masih dirasakan dampaknya, baik dampak yang bersifat negatif maupun positif. Dampak negatif krisis ekonomi itu antara lain berupa tingkat pertumbuhan perekonomian rendah, banyaknya perusahaan mengalami kebangkrutan, pengangguran membengkak serta jumlah penduduk miskin makin bertambah. Sedangkan dampak positifnya berupa mengingatkan dan menyadarkan pemerintah perlunya perubahan paradigma pembangunan yang selama ini menggunakan pendekatan-pendekatan berlandaskan ekonomi konglomerat untuk dikembalikan berdasarkan ekonomi kerakyatan dengan memberikan peran yang tinggi terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM diperoleh pengertian bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Peranan UMKM, terutama sejak krisis ekonomi dapat dipandang sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah mengesahkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berkaitan dengan UU tersebut Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Usaha Micro Kota Bandar Lampung. Meski Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Pada dasarnya hambatan dan kendala yang dihadapi para pelaku UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks meliputi berbagai aspek yang mana satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain: kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi

dan terbatasnya pemasaran. Disamping itu terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas. Beragamnya hambatan dan kendala yang dihadapi UMKM, tampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi para UMKM, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usaha.

Mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan berbagai upaya dalam mengatasi persoalan UMKM tersebut dengan melakukan Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung yang diatur dalam Peraturan Daerah No 03 Tahun 2016.

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota di Indonesia sekaligus ibukota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau Jawa. Selain itu, sesuai dengan pernyataan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang mengatakan bahwa Bandar Lampung tidak hanya menjadi pusat industri tetapi juga menjadi kota bisnis, perdagangan dan jasa. Hal ini memperlihatkan kesiapan Kota Bandar Lampung untuk menghadapi persaingan global. Seiring dengan tumbuh kembangnya Kota Bandar Lampung yang memiliki visi "Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan" mendapatkan julukan kota "Tapis Berseri" yang menjadi sentra penggerak ekonomi, jasa, dan sosial politik di Lampung.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatur permasalahan-permasalahan produk dalam negeri dalam menghadapi persaingan global khususnya kesiapan produk yang dihasilkan dan kesiapan masyarakat Kota Bandar Lampung, sehingga sangat diharapkan oleh masyarakat untuk bisa melakukan pendataan, manajemen, pelatihan, pemberdayaan, promosi, pelayanan, kualitas dan pengawasan yang sesuai agar masyarakat Kota Bandar Lampung mampu menghadapi dan bersaing nantinya dan juga Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung melakukan pengembangan-pengembangan dan senantiasa memenuhi kebutuhan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Rumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung sama sebangun dengan rumusan sektor industri, perdagangan dan koperasi skala nasional. Rumusan RPJPD Kota Bandar Lampung 2010-2025 bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah (1) Memperkuat basis industri manufaktur sehingga menjadi industri kelas dunia (*world class industry*). (2) Memperkuat industri penggerak pertumbuhan ekonomi. (3) Meningkatkan sumbangan Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap PDB dibandingkan dengan sumbangan industri besar. (4) Menguatkan jaringan kerjasama/*networking* antara IKM dan industri besar.

Dalam hal ini Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung. Karena masih banyak permasalahan yang dialami oleh para pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung khususnya pada pelaku di Taman UMKM Bung Karno sehingga Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi harus lebih berperan aktif dalam menghadapi masalah yang dialami oleh UMKM di Kota Bandar Lampung.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 2 yaitu : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (2) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. Pengembangan usaha; b. Kemitraan; c. Perizinan; dan d. Koordinasi dan pengendalian. Sudah

menjadi kewajiban bagi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk keberlangsungan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Hal ini tentu menjadi sebuah acuan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah No 03 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung.

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung.”

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Taman UMKM Bungkarne)

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian ini adalah tentang Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Taman UMKM Bungkarne)?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah peneliti paparkan dan dengan memperhatikan pada fokus penelitian, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah : Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Taman UMKM Bungkarne)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Taman UMKM Bungkarne).

F. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

a. Manfaat Teoretis

1. Sebagai bahan masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Serta untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM..
2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori dan konsep yang diperoleh selama mengikuti program perkuliahan Pemikiran Politik Islam terutama yang berkaitan dengan mata kuliah.
3. Sebagai bahan pustaka atau literatur bacaan bagi praktisi ekonomi dan pembuat kebijakan publik agar memberikan informasi pengetahuan

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelaku UMKM dan masyarakat Kota Bandar Lampung untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan global sehingga mampu bersaing dengan baik agar tidak tertinggal dengan Negara lain

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian. Peneliti harus belajar dari

peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fahrudin dengan judul “Analisis Peran Program UMKM Binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Terhadap Perkembangan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan Hasil dari program pengembangan klaster yang di susun oleh KPW. Bank Indonesia provinsi Lampung apabila melihat pada objek penelitian sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan tahapan tahapan sebagai upaya pengembangan usaha. Tahapan tahapan mulai dari survei sampai tahapan passing out sudah berjalan yang di dalamnya terdapat rangkaian pelatihan dan pendampingan klaster dalam masa program klaster berjalan sehingga dampak positif kian terasa oleh pengelola di masing masing kelompok mulai dari jumlah produksi, pendapatan, permodalan dan tenaga kerja mengalami peningkatan dan itu semua merupakan indikator perkembangan ekonomi. Penerapan program ini juga selaras dengan Ekonomi Islam dengan prinsip kemandirianya sebagai tujuan utama dari melakukan bisnis, bermusyawarah dalam melakukan perbaikan serta ber inovasi dari waktu kewaktu agar usahanya tetap bisa bertahan mengikuti perkembangan jaman dan hal ini selaras dengan hukum Al Qur’an dan Hadis yang di jadikan landasan ekonomi islam tak terkecuali dalam hal mengembanhkan usaha.⁷ Penelitian diatas lebih mengarah pada analisis peran program UMKM, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Ch T Wonok, Femmy Tulusan, Joorie Ruru dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Suatu Studi Di Kecamatan Kawangkoan Utara). Berdasarkan hasil penelitian apat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di kecamatan Kawangkoan Utara sudah berjalan dengan cukup efektif dikarenakan ada sebagian informan dari hasil wawancara berpendapat bahwa masih ada kekurangan pada setiap indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yakni responsivitas, pengembangan, kecukupan.⁸ Pada penelitian diatas berfokus pada efektifitas kebijakan pemerdayaan Usaha Mikro kecil dan menengah sedangkan peneliti saat ini berfokus pada optimalisasi dengan melihat bagaimana implemetasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di kota Bandar Lampung.
3. Imam Santoso Wahyudi melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Satuan Pelaksanaan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan di Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum keempat aspek dalam mengukur tingkat Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi pada Satuan Pelaksana Koperasi, UMKM serta Perdagangan di Kecamatan Mampang Prapatan selama kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu 2018 dan 2019, berjalan baik dan lancar karena UMKM merupakan komponen fundamental kedigdayaan ekonomi nasional/daerah.⁹ Pada penelitian terdahulu membahas prihal implementasi kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah dengan berpatokan pada empat aspek yakni, komunikasi, sumber daya, sikap, dan strutur birokrasi pada satuan pelaksana koperasi. Sedangkan penelilti saat ini berfokus pada bagaimana implementasi

⁷ Fahrudin, “Analisis Peran Program UMKM Binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Terhadap Perkembangan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

⁸ Yolanda Ch T Wonok, Femmy Tulusan, Joorie Ruru, “Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Suatu Studi Di Kecamatan Kawangkoan Utara).” (Artikel journal)

⁹ Imam Santoso Wahyudi, “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Satuan Pelaksanaan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan di Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan”. (Tesis, Politeknik STIA LAN Jakarta, 2020).

kebijakan usaha mikro di kota bandar lampung yang diukur melalui 6 variabel yakni standar/ukuran tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antaraorganisasi, dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

4. Penelitian yang dilakukan oleh, Aldi Kurnia Wahyu, Yoga Raffi Krisnanda Putra, Rizky Wahyu Sri Utami, Diana Hertati dengan judul Efektivitas Pemberlakuan Jam Operasional Bagi Sektor UMKM Di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jam operasional yang terbilang dalam pelaksanaan PPKM Mikro bagi UMKM masih kurang efektif, hal ini terlihat dari respon para pelaku UMKM yang sangat keberatan dengan pelaksanaan jam operasional yang mengakibatkan kerugian. bagi pelaku UMKM meski implementasinya telah mampu menekan angka penyebaran COVID 19.¹⁰ Penelitian sebelumnya meneliti tentang Efektivitas Pemberlakuan Jam Operasional Bagi Sektor UMKM sedangkan dalam penelitian ini peneliti menjabarkan perihal bagaimana implementasi kebijakan usaha mikro.

Dari beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang menyerupai dengan penelitian ini bahwasannya judul penelitian ini berfokus pada bagaimana **“Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Taman UMKM Bungkarne)”** karena dirasa masih banyak kendala dan ketidaksesuaian terkait implementasi kebijakan Berdasarkan PERDA No 03 tahun 2016. Dengan ini Pemaparan diatas tidak ada judul yang secara spesifik sama dengan yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif secara lapangan (*field study research*). Penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan dalam menganalisis kehidupan/fenomena sosial yang terjadi di sekitarnya. Baik itu lingkungan tempat tinggal, masyarakat, organisasi, bahkan lembaga pendidikan, dsb.¹² Penelitian lapangan ini menggunakan pengamatan dalam bentuk Study kasus (*Case study*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.¹³ Dapat diartikan pula studi kasus adalah metode penelitian deskriptif untuk menjawab permasalahan yang mendalam dan melibatkan subjek penelitian yang terbatas sesuai dengan jenis kasus yang diselidiki.¹⁴

2. Sifat Penelitian

¹⁰ Aldi Kurnia Wahyu, Yoga Raffi Krisnanda Putra, Rizky Wahyu Sri Utami, Diana Hertati, “Efektivitas Pemberlakuan Jam Operasional Bagi Sektor UMKM Di Kota Surabaya”, (Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik, Volume 2 Nomor 2 Mei 2021).

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 9

¹² Sudaryono, Metodologi Penelitian. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Cetakan II. 2018. h.82

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 13, 2006, h. 142.

¹⁴ Yuberti and Antomi Saregar, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika Dan Sains* (Bandar Lampung: Aura, 2017).

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sehingga Penelitian ini bersifat deskriptif analisis tepatnya berupa studi kasus. Penelitian deskriptif menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Bentuk yang diamati bisa berupa sifat dan pandangan yang menggejala saat sekarang.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Taman UMKM Bungkaru).

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶ Dalam penelitian kualitatif lebih kepada kualitas atau sumber informasi yang massif dan jelas. Sehingga sangat terlihat sekali perbedaannya dibandingkan dengan penelitian kuantitatif yang menitikberatkan pada data dan angka. Oleh sebab itu, peneliti harus benar-benar teliti dan hati-hati agar sumber-sumber yang disajikan adalah hasil informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber, yaitu data primer dan juga data sekunder, diantaranya :

a. Data Primer

Data primer adalah data atau sumber informasi utama yang dikumpulkan dan diambil langsung dari orang atau sumber-sumber informasi lainnya.¹⁷ Sugiyono mengungkapkan data primer adalah data yang memberikan data pada pengumpul data. Dalam hal ini penulis memperoleh data secara langsung dari informan melalui wawancara secara mendalam dan hasil observasi terhadap Data implementasi kebijakan Peraturan Daerah tatang pemberdayaan UMKM kepada Anggota dinas Peindustrian, perdagangan dan koperasi kota Bandar Lampung, serta Masyarakat selaku Pemeran UMKM diantaranya :

Tabel 1.1 Sumber Data Primer

No.	Kode Informan	Nama	Keterangan	Jenis Kelamin
1.	I1-1	Drs. Girendra, M. M	Kepala Dinas Indagkop	Laki-laki
2.	I2-1	Mutiah M. Aliun, S.E., M. M	Sekretaris Dinas Indagkop	Perempuan
3.	I3-1	Lisa Septiana, SH, MH	Kabid Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	Perempuan
4.	I4-1	Noviana, SE, MM	Kabid. Pemberdayaan Usaha Mikro	Perempuan
5.	I5-1	Yuliarti, SE. MM	Kabid Kelembagaan Dan Pengawasan	Perempuan

¹⁵ M. Subana dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 89

¹⁶ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.172

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 9

6.	I6-1	Dra. Lilis Herawati	Pelaku Taman UMKM BungKarno Kota Bandar Lampung. “Bella Cookies”	Perempuan
7	I6-2	Norma Suhaedah	Pelaku Taman UMKM BungKarno Kota Bandar Lampung. “Mama Bolu Tape Benteng”	Perempuan
8.	I6-3	Abdul Hafid	Pelaku Taman UMKM BungKarno Kota Bandar Lampung.	Laki-Laki

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan melengkapi data primer. Sugiyono mengungkapkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain, yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.¹⁸ Data sekunder diperoleh dari sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi yang relevan sebagai pendukung penelitian. Data sekunder diperoleh dari jurnal, Artikel, Perda dan buku terkait Pemberdayaan UMKM yang ada relevansinya dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian karena bertujuan mendapatkan data penelitian.¹⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan. Metode yang digunakan secara spesifik dalam penelitian ini adalah dengan analisis hasil wawancara baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, angket/kuisisioner yang bersifat terbuka, dokumen dan observasi. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Sumber data dan jenis data yang terdiri atas kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto dan data statistik. Selain itu masih ada sumber data yang tidak dipersoalkan di sini seperti yang bersifat nonverbal.²⁰ Untuk memperoleh data yang valid dan objektif penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya :

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena

¹⁸ Ibid. h.241

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* h. 308.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 241

dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.²¹ Dapat juga diartikan Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.²² Artinya observasi ini dilakukan untuk mengamati bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Taman UMKM Bungkarno) dengan cara mengamati secara langsung terhadap subyek maupun obyek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).²³ Metode wawancara atau interview juga merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatapmuka, antara pewawancara dengan narasumber (responden).²⁴ Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Taman UMKM Bungkarno) dengan tidak hanya mengandalkan sumber literasi saja. Melalui metode ini peneliti melakukan dialog interaktif kepada narasumber yakni Pegawai Dinas Peindustrian, perdagangan dan koprasi kota Bandar lampung, serta Masyarakat selaku Pemeran UMKM.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.²⁵ Dokumentasi adalah metode sebagai bukti kuat bahwa penelitian yang dilakukan itu nyata dan benar adanya tanpa manipulasi informasi. Sehingga dokumentasi diambil untuk momen yang memang dinyatakan bahwa telah melakukan penelitian dengan narasumber beserta lokasinya. Termasuk juga di dalamnya ada dokumen-dokumen yang menunjang keabsahan penelitian ini Dalam penelitian ini dokumentasi berupa catatan serta data-data tertulis yang dapat digunakan sebagai pendukung data penelitian.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang diakumulasikan untuk mengerti tentang subyek kemudian mempublikasikan hasil penelitian. Setelah berbagai sumber didapatkan, maka peneliti mengolah data-data tersebut dengan cara deskriptif-analitis. Maksudnya peneliti berusaha menganalisis secara kritis apakah semua sumber tersebut memang benar adanya, baik secara normatif maupun empiriknya. Sehingga nantinya penyajian karya tulis ilmiah dapat disajikan dengan apik dan matang untuk memudahkan pembaca atau yang lainnya dalam memahami karya tulis ilmiah ini.²⁷

Menurut Sugiyono proses analisis data dilakukan dengan beberapa langkah. Mulai dari pra-riset sebelum ke lapangan menggunakan data sekunder²⁹, kemudian observasi langsung terhadap penelitian untuk memastikan dan mengumpulkan data yang valid selain data sekunder,²⁸ hingga seleksi dari berbagai data yang dikumpulkan untuk diuraikan dalam

²¹ Andi, Kristanto. 2018. Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya. Yogyakarta: Gava Media. (n.d.).

²² Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif, (CV: Pustaka Ilmu Group, 2021), h. 138

²³ Ibid., h. 138

²⁴ A. Muri Yusuf. 2014. 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan'. Jakarta: Prenadamedia Group. (n.d.).

²⁵ Iryana, Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Kualitatif, (Ekonomi Syariah: STAIN Sorong) (n.d.),h. 10

²⁶ Sudaryono, Metodologi Penelitian. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Cetakan II. 2018. H. 219

²⁷ Ibid., h. 433-434.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* h.245.

rangka penyajian hasil riset yang layak dan sesuai kepada pembaca. Menurut Milles and Huberman data yang telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, dan dokumentasi) kemudian dianalisis melalui tiga tahapan yaitu meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²⁹ Berikut tahapan analisis data,³⁰ diantaranya:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diveryifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat.³¹ Untuk itu peneliti melakukan reduksi data yang diambil dari lapangan terkait Bagaimana “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Taman UMKM Bungkarne)”.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³²

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Verification*)

Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.³³

I. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan analisis data yang didapatkan dilapangan bahwa terdapat beberapa masalah yang peneliti temukan dilapangan yaitu : Pertama, Belum adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang disediakan oleh Pemkot Bandar Lampung dalam masalah permodalan dan kurang rutusnya pelatihan keuangan. Kedua, Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan optimal. Ketiga, Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung belum tepat sasaran karena masih banyak Para Pelaku UMKM yang belum memiliki perijinan usaha dan sertifikat halal. Keempat, Fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung belum memadai terutama pada sarana Promosi dan Informasi. Kelima, Kurangnyaperhatian pemerintah dan kurang monitoring dalam hal pemberdayaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model teori implementasi yang dipaparkan oleh Van Meter Van Horn. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn terdapat enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu: Standar atau Ukuran tujuan kebijakan, Sumberdaya, Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas

²⁹ Miles, B. Mathew Dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP. (n.d.). H.64

³⁰ Ibid., h, 253-266.

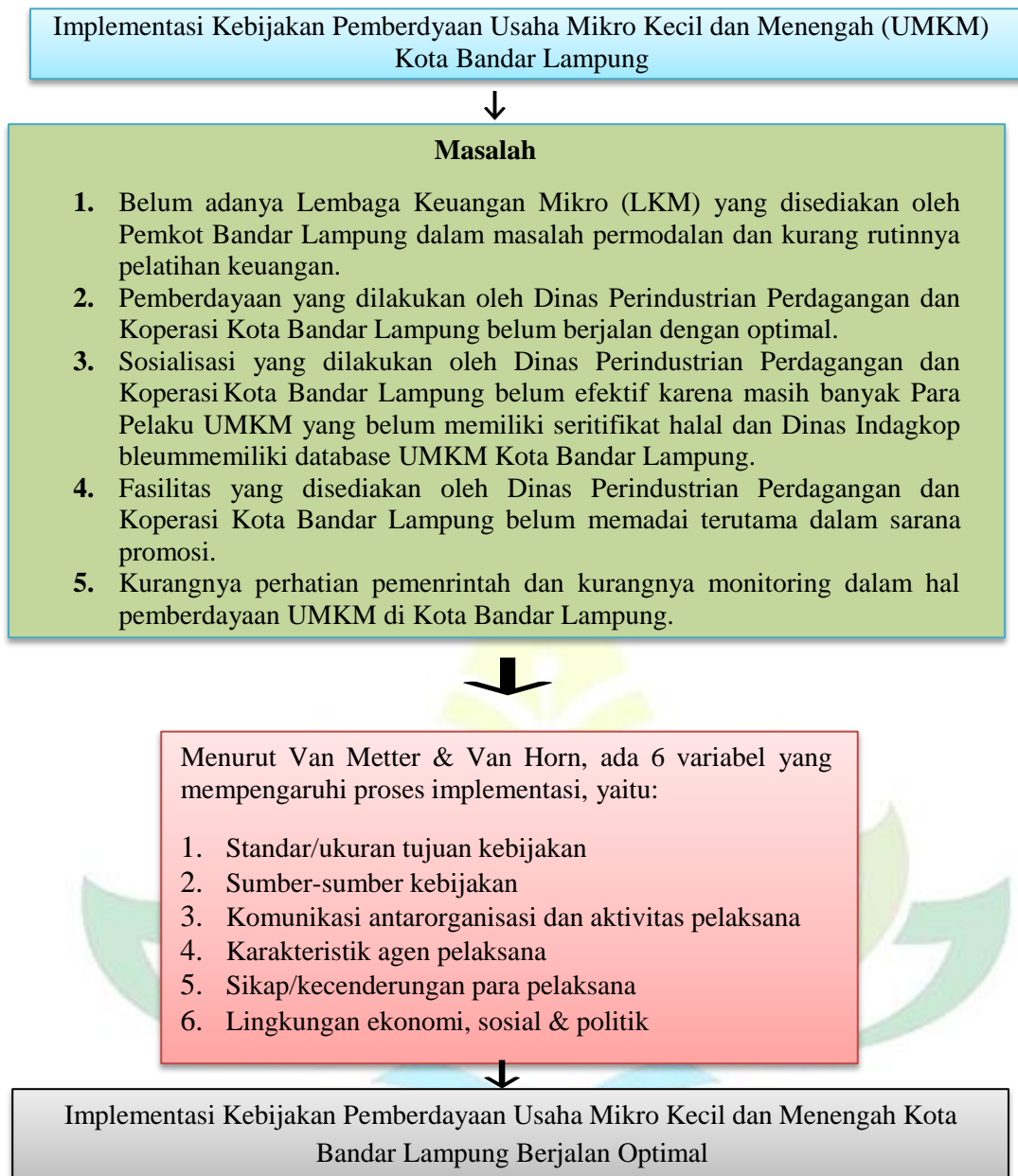
³¹ Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif, (CV: Pustaka Ilmu Group, 2021), h. 164.

³² Ibid., h. 167.

³³ Ibid, h. 170.

pelaksana, Karakteristik agen pelaksan, Sikap atau kecendrungan para pelaksana, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Untuk lebih mudah dan jelas memahami alur berpikir peneliti, maka di bawah ini peneliti menggambarkan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut.

Tabel 1.2 Kerangka Berfikir Penelitian



J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan garis besar penyusunan penelitian ini yang berujuan untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan isi dari penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian mengenai “**Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Taman UMKM Bungkarno)**”, tersusun atas sistematika sebagai berikut :

Bagian awal Skripsi skripsi ini terdiri dari sampul depan (cover), lembar pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran-lampiran.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Kerangka Teori dan Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat kajian teoritis yang membahas mengenai konsep kebijakan, tahap-tahap, model-model implementasi kebijakan, konsep dan definisi UMKM.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

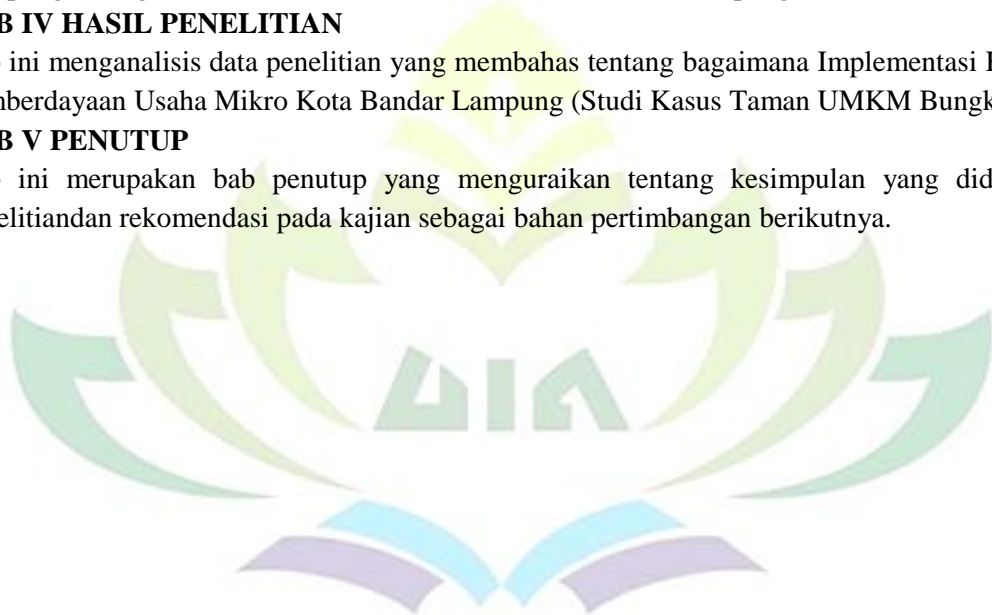
Bab ini membahas objek penelitian yang memuat Gambaran Umum Objek Penelitian dan penyajian fakta serta data penelitian meliputi latar belakang dan sejarah Kota Bandar Lampung, kondisi Ekonomi, visi dan misi dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi kota Bandar Lampung serta gambaran umum Taman UMKM Kota Bandar Lampung.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menganalisis data penelitian yang membahas tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Taman UMKM Bungkarno).

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitiandan rekomendasi pada kajian sebagai bahan pertimbangan berikutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.³⁴ Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Bagi para pemegang kekuasaan yang berwenang dalam membuat kebijakan-kebijakan, tentu perlu pertimbangan serta peninjauan secara seksama. Karena kebijakan-kebijakan yang dibuat memiliki dampak yang luas, tidak hanya oleh kelompok tertentu, namun masyarakat juga dapat merasakan dampak tersebut.

Pada dasarnya, kebijakan dibuat untuk melakukan tindakan pencegahan dan bukan saat telah terjadi atau sudah terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya).³⁵ Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan definisinya secara lebih terperinci pada makna kebijakan, Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti itu mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana”.

Dengan banyaknya definisi kebijakan yang telah diberikan para pakar ahli, mengartikan bahwa kebijakan memang melekat dalam kehidupan sehari-hari, karena seringkali dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan. Menurut Solichin, menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

B. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut *public policy*. Dengan adanya tujuan yang ingin direalisasikan dan adanya masalah publik yang harus diatasi, maka pemerintah perlu membuat suatu kebijakan publik. Kebijakan yang merupakan sekumpulan keputusan-keputusan yang ditetapkan, yang bertujuan dalam melindungi serta membatasi perilaku atau tindakan masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Karena para pembuat kebijakan perlu mencari tahu dan meninjau terlebih dulu terkait isu-isu masalah apa yang terjadi di masyarakat. Masyarakat adalah sumber utama dalam penyusunan kebijakan publik. Kebijakan ini untuk keberhasilannya tidak hanya didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan administratif, akan tetapi juga harus didasarkan atas pertimbangan etika dan moral.

Frederick, mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan, kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Anderson sebagaimana dikutip Tachjan, mengemukakan bahwa, “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Maksudnya, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk:

³⁴ Mirriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 12

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm.13

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan lapangan yang telah peneliti uraikan pada BAB IV, berikut peneliti simpulkan hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung. Dari ukuran dan tujuan kebijakan, peneliti menarik kesimpulan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung sudah baik dan sesuai dengan manfaatnya meskipun masih terdapat kekurangan. Sertifikasi halal dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung sudah menyediakan fasilitas secara gratis kepada para UMKM untuk membuat sertifikasi halal, tidak hanya itu saja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung. Permodalan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung sudah menyediakan fasilitas terkait permodalan diantaranya bekerjasama dengan pihak perbankan seperti BRI dan BNI lalu pihak non-perbankan seperti Pegadaian tetapi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung belum menyediakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Sumber-sumber kebijakan pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi terkait sumber-sumber kebijakan dalam pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung, dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung sebagai pembuat kebijakan masih belum memaksimalkan sumber- sumber kebijakan seperti Sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung bisa dibilang baik karena mayoritas berpendidikan tinggi namun sayangnya dari segi kuantitas masih kurang sehingga kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung masih belum optimal. sehingga dana yang diberikan harus dimaksimalkan. Dengan uraian sebagai berikut:

1. Sertifikasi halal dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung sudah menyediakan fasilitas secara gratis kepada para UMKM untuk membuat sertifikasi halal, tidak hanya itu saja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung. Disisi lain, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung harus mempunyai data terkait jumlah UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal dan yang belum memiliki halal agar bisa kelihatan nantinya bagi mereka yang belum menikmati fasilitas tersebut.
2. Permodalan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung sudah menyediakan fasilitas terkait permodalan diantaranya bekerjasama dengan pihak perbankan seperti BRI dan BNI lalu pihak non-perbankan seperti Pegadaian tetapi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung belum menyediakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Masih banyak para pelaku UMKM yang masih menggunakan modal usahanya secara pribadi dikarenakan para pelaku UMKM belum rapih dalam mengelola keuangan sehingga sulit mendapatkan kepercayaan untuk mengajukan modal ke perbankan dalam hal perencanaan keuangan UMKM masih sangat lemah sehingga butuhnya dorongan dan perhatian yang lebih dalam hal perencanaan ini.
3. Kegiatan yang dibuat oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung sifatnya sudah lebih ke pelatihan, penyuluhan, bimtek, workshop dan sosialisasi. Untuk kegiatan yang bersifat seminar sampai sejauh ini sudah jarang dilakukan.
4. Aspek ukuran dan tujuan kebijakan, peneliti menemukan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan ini sudah baik dan sesuai dengan manfaatnya yaitu untuk menjadi UMKM sehat, mandiri dan memiliki daya saing. Namun peneliti juga menemukan kekurangan yaitu pemerintah belum memiliki data jumlah UMKM yang sudah maupun yang belum memiliki sertifikat halal lalu

- pemerintah masih belum menyediakan LKM dan masih kurang rutinnnya latihan pengelolaan keuangan.
5. Sumber-sumber kebijakan pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi terkait sumber-sumber kebijakan dalam pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung, dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung sebagai pembuat kebijakan masih belum memaksimalkan sumber-sumber kebijakan seperti Sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung bisa dibidang baik karena mayoritas berpendidikan tinggi namun sayangnya dari segi kuantitas masih kurang sehingga kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung masih belum optimal.
 6. Karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan program Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung, kesiapan dan kesesuaian pemerintah dan agen pelaksana sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung melibatkan juga pihak dari luar dalam suatu kegiatan seperti diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan, MUI Provinsi, Kementerian Koperasi, BUMD, Asosiasi UKM, Pihak swasta dan Perbankan dalam melaksanakan sebuah kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung.
 7. Sikap/kecenderungan agen pelaksana ada 2 yaitu inisiatif dan partisipatif. Inisiatif dalam penelitian ini lebih kepada dukungan dari pelaku UMKM terhadap kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung. Para pelaku UMKM mendukung adanya program-program yang dibuat oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung dengan tujuan memajukan para UMKM dengan program yang bermanfaat bagi mereka. Dan sejauh ini belum ada pihak yang menentang atau menolak terhadap program yang dibuat oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung.
 8. Partisipatif dalam penelitian ini lebih kepada seberapa jauh masyarakat, pelaku UMKM, Dinas Terkait, dan yang lainnya terlibat dalam penyusunan program-program yang dibuat oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung. Bila dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa pihak peneliti dengan informan dapat diketahui bahwa semua elemen yang berkepentingan ikut terlibat dalam hal penyusunan program Pemberdayaan UMKM ini. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung mengundang semua perwakilan tersebut untuk hadir dalam penyusunan program Pemberdayaan UMKM walaupun belum secara keseluruhan bisa diundang karena keterbatasan tempat. Bagi pelaku UMKM yang belum ikut terlibat akan dilibatkan untuk tahun berikutnya menurut hasil wawancara dengan pihak dinas bahwasannya akan di rolling agar semuanya bisa terlibat.
 9. Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung ini komunikasi yang terjalin antara lembaga pemerintah dan para pelaksana di lapangan sudah terjalin dengan baik. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung mengundang dinas terkait dengan mengunjungi langsung ke wilayahnya dengan memberikan sebuah surat undangan untuk suatu kegiatan tidak hanya kepada dinas terkait tetapi juga kepada pelaku UMKM. Dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung juga memanfaatkan teknologi saat ini yaitu dengan menggunakan whatsapp untuk menginfokan sebuah kegiatan lewat sebuah grup asosiasi UKM yang ada di grup whatsapp.
 10. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dalam pelaksanaan Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung kondisi lingkungan sosial sangat mendukung jalannya Pemberdayaan UMKM ini karena dengan adanya Pemberdayaan bisa menambah jiwa kewirausahaan mereka dan menambah keahlian mereka dalam menciptakan suatu produk

yang nantinya akan dipasarkan melalui pelatihan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung. Lalu dari segi ekonomi di Kota Bandar Lampung daya beli masyarakatnya sangat tinggi karena dilihat dari pendapatan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat Kota Bandar Lampung yang bisa dibilang modern sehingga ini peluang bagi para UMKM untuk membuka usahanya tidak hanya itu lokasi Kota Bandar Lampung yang sangat strategis berdekatan dengan ibukota Jakarta dan memiliki bandara terbesar yaitu Soekarno Hatta yang merupakan pintu gerbang Indonesia bagi para wisatawan. Dan dari segi politik pemerintah Kota Bandar Lampung beserta Dewan mendukung jalannya kegiatan Pemberdayaan UMKM namun kue APBD yang harus dibagi-bagi sehingga dana yang diberikan harus dimaksimalkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti berikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung sebagai pembuat kebijakan perlu membuat sebuah database terkait jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung, baik itu database yang berupa kepemilikan sertifikat halal maupun yang belum dan database secara umum mengenai identitasnya. Agar semua bisa terfasilitasi dalam kegiatan sehingga yang datang tidak hanya itu-itu saja.
2. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung harus lebih memperhatikan UMKM di Kota Bandar Lampung terutama dalam hal promosi yaitu dengan menyediakan sebuah geray sentra oleh-oleh khas Tangerang agar produk UMKM lebih dikenal tidak hanya itu saja tetapi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung harus memberikan kesempatan kepada para UMKM untuk menyuguhkan/memperkenalkan produknya bilamana ada tamu dari pihak luar daerah.
3. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bandar Lampung harus bisa memaksimalkan anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung dalam memenuhi kebutuhan para Pelaku UMKM Kota Bandar Lampung.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Andi, Kristanto. *Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
Budiona, Kamus Ilmiah Populer Internasional (Surabaya: Alumni). 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 13, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*. CV: Pustaka Ilmu Group. 2021
Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).
- Mulyadi, Deddy. *Studi kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Muhadjir, Noeng, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000.
- Salim, Peter, Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia kontemporer*, Ed. 3, Jakarta : Modern English Press, 2002.
- Subana, Muhammad dan Sudrajat. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Cetakan II. 2018.
Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Sumber Jurnal**
- Aldi Kurnia Wahyu, Yoga Raffi Krisnanda Putra, Rizky Wahyu Sri Utami, Diana Hertati, “Efektivitas Pemberlakuan Jam Operasional Bagi Sektor UMKM Di Kota Surabaya”, (Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik, Volume 2 Nomor 2 Mei 2021).
- Fahrudin, “*Analisis Peran Program UMKM Binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Terhadap Perkembangan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”.(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).
- Imam Santoso Wahyudi, “*Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Satuan Pelaksanaan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan di Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan*”. (Tesis, Politeknik STIA LAN Jakarta, 2020).
- Iryana, Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Kualitatif, (Ekonomi Syariah: STAIN Sorong).
- Miles, B. Mathew Dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP.
- Okta Septiana Wati, “*Peranan Kur Terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus BPD Lampung KC*

Bandar Jaya Lampung Tengah”). (Skripsi, IAIN Metro, 2019).

Yolanda Ch T Wonok, Femmy Tulusan, Joorie Ruru, “*Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Suatu Studi Di Kecamatan Kawangkoan Utara).*” (Artikel journal)

Yuberti and Antomi Saregar, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika Dan Sains* (Bandar Lampung: Aura, 2017).

Sumber Perundang-Undangan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016, tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).

Sumber Online

Pengertian Kota Bandar Lampung ”(Online), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung (16 November 2021).

